

Respon Guru Sejarah Sekolah Menengah Atas terhadap Wacana Alternatif Tragedi Kemanusiaan 1965

Kartika Pratiwi

Abstrak. *Sebelum Reformasi 1998, wacana tentang Tragedi Kemanusiaan 1965 mengikuti versi yang dibuat oleh rezim Orde Baru. Jatuhnya rezim Orde Baru menyulut sebagian dari masyarakat untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kebenaran peristiwa Tragedi Kemanusiaan 1965. Beberapa dari mereka membuat film dokumenter dan buku yang menyediakan sisi lain dari wacana sejarah yang telah ada. Media dan bahan diskusi baru yang bermunculan ini ‘menantang’ untuk sekolah dan guru sejarah agar lebih terbuka akan penerjemahan sejarah dari sisi lain. Namun, wacana tentang sejarah alternatif tidak selamanya mempunyai dampak. Beberapa dari guru sejarah masih memakai buku sejarah lama yang dibuat di jaman Orde Baru karena ‘dihantui’ oleh rasa ketakutan pada rezim sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tanggapan dari guru sejarah terhadap wacana sejarah alternatif dengan topik Tragedi Kemanusiaan 1965. Penelitian dilakukan dengan memakai metode pemutaran film dokumenter sejarah yang mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan versi dari rezim Orde Baru. Studi ini juga dipakai untuk melihat sampai sejauh mana guru sejarah mau untuk mempertimbangkan memakai narasi sejarah alternatif dalam metode pengajaran mereka. Penelitian ini diharapkan membantu perkembangan kurikulum sejarah demi pendidikan yang manusiawi dan demokratis di samping menyajikan bentuk metode pendidikan yang baru dengan menggunakan audio visual sebagai media dalam pembelajaran sejarah.*

Wacana mengenai sejarah bangsa Indonesia di sekolah tampaknya tak banyak diminati oleh para murid masa kini karena mereka dituntut oleh guru dan nilai untuk hanya menghafalkan nama peristiwa, tanggal, dan nama-

nama pahlawan tanpa dibimbing untuk bersikap kritis terhadap peristiwa-peristiwa bersejarah itu. Salah satu kritik mengenai cara pengajaran sejarah diungkapkan oleh Niels Mulder yang mengatakan bahwa materi kelas sejarah hanya menjelaskan kronologi peristiwa dan diceritakan tanpa teori atau koherensi yang berasal dari proses perhubungan masing-masing periode sejarah.¹⁸ Hal ini bisa dikatakan sebagai pengkerdilan materi sejarah, yang kemudian diperkeruh oleh pemeliharaan dominasi Orde Baru yang memegang kendali cerita sejarah dan membungkam versi kebenaran lainnya.¹⁹ Dengan menggunakan penjelasan di atas, penulis mengacu pada istilah yang ditawarkan Antonio Gramsci, yaitu “hegemoni” yang disejajarkan dengan istilah “kekuatan” suatu rezim tertentu.²⁰

Perekayasa dalam pendidikan tidak hanya melalui buku teks, tetapi juga berlangsung melalui medium lain seperti audio visual. Sebagai contoh, di sekolah para siswa diharuskan menonton film *Pengkhianatan G30S/PKI* setiap tahun pada tanggal 30 September. Dengan pemutaran film yang berlangsung terus-menerus dalam pendidikan formal ini tentunya generasi yang terlahir pada masa itu mendapatkan sosok komunis secara jelas hanya melalui film itu. Narasi film menekankan bahwa komunis, Gerwani, dan komunitas-komunitas di bawah naungan PKI itu jahat, termasuk di naskah maupun gambar visualnya.

Dari persinggungan di atas membuktikan bahwa pendidikan di satu sisi memiliki kekuasaan atas pembentukan identitas masyarakat dan negara. Namun, di sisi lain pendidikan menjadi instrumen kekuasaan dari masyarakat dan negara. Seperti yang diungkapkan oleh Budi Irawanto

18 Mulder, Niels. 2000. *Individu, Masyarakat, dan Sejarah: Kajian Kritis Buku-Buku Sekolah di Indonesia* (Bagian 2). Yogyakarta: Kanisius, hal. 59.

19 Widja, I. G. 2002. *Menuju Wajah Baru Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, hal. vi.

20 Secara etimologis, kata hegemoni berasal dari bahasa Yunani :*egemonia/egemon*, yang berarti pemimpin atau penguasa dalam konotasi yang lazimnya berhubungan dengan konteks kenegaraan. Antonio Gramsci menjadi pelopor penggunaan istilah hegemoni hingga melahirkan kajian yang beragam. Di tangan Gramsci, kata hegemoni tidak hanya berarti satu dominasi politik dalam relasi antar negara, tetapi juga merupakan dominasi politik dari suatu kelas yang berkuasa terhadap kelas yang lemah dalam relasi sosial. Terlebih, hegemoni juga bisa berarti dominasi yang lebih umum sdi bidang-bidang lainnya, seperti kebudayaan, ideologi, pendidikan, gender dan sebagainya (Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan*. Bandung: Mizan Pustaka, hal. 28)

dalam artikelnya yang berjudul *Rezim Visual Nan Militeristik*²¹, kekuatan pada yang visual rupanya dipercaya oleh kalangan militer sebagai sumber untuk menyampaikan sejarah.. Artinya, peserta didik menjadi subjek eksploitasi suatu kekuasaan di luar pendidikan dan menjadikan mereka sebagai objek-objek dan alat dari suatu rejim yang mempunyai kekuasaan saat itu. Tidak mengherankan bila pemerintah dan khususnya wacana sejarah 65 mempunyai kepentingan untuk menguasai pendidikan dan melalui pendidikan inilah terjadi indoktrinasi.

Sekalipun peserta didik adalah sekelompok individu yang seharusnya mempunyai ruang gerak bebas di dalam sejarah dan mereka harusnya mampu menentukan posisi di mana harus berada, di sini sosok mereka menjadi bias karena penguasaan sejarah yang sepihak. Tidak semua sekolah bisa bersikap demokratis untuk membahas kembali wacana 65 karena mereka hanya mengacu pada satu buku tertentu yang tidak berbeda dengan buku terbitan masa Orde Baru. Di sini guru sejarah memegang peranan penting dalam konteks melawan pemalsuan sejarah dengan topik wacana 65. Guru menjadi pemantik bagi siswa agar siswa bersikap kritis terhadap topik-topik yang sensitif, bukannya malah membatasi. Guru juga semestinya mendampingi siswa untuk lebih melihat sejarah melalui kacamata humanis dan memberi ruang seluas mungkin terhadap wacana alternatif.²²

Wacana publik tentang penulisan ulang sejarah dimulai pada tahun 1998, sudah lebih dari tiga belas tahun yang lalu. Bagaimana dampaknya sekarang? Apakah sejarah resmi Indonesia di sekolah bebas dari penyimpangan Orde Baru? Sejak tahun 1998 pula Departemen Penerangan memutuskan tidak lagi memutar film *Pengkhianatan G30S/PKI* di semua saluran televisi. Namun, kebijakan tersebut tidak menyelesaikan persoalan terutama dari segi penulisan dan pengajaran sejarah di Indonesia.²³ Oleh karena itu, penelitian ini didasari oleh pertanyaan besar mengenai dinamika kurikulum sejarah mengenai Tragedi Kemanusiaan 1965 dari masa Orde Baru sampai pasca Orde Baru. Penulis menemukan ada versi yang berbeda dari beberapa buku sejarah yang digunakan oleh guru sejarah dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Contohnya dalam penulisan kata 'PKI' di belakang G30S. Perdebatan

21 Budi Irawanto mengulas buku Katharine E. McGregor, *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia*. (www.budiirawanto.multiply.com), 5 Oktober 2008.

22 Paulo Freire dalam dialog dengan Ira Shor, *Menjadi Guru yang Merdeka*. 2001. Yogyakarta: LKIS, hal. 50).

23 Asvi Warman Adam. 1999. *Pengendalian Sejarah Sejak Orde Baru* dalam *Buku Panggung Sejarah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 573.

ini mencuat saat beberapa kelompok masyarakat mencoba menghapus kata PKI. Namun, pada tahun 2009 Kejaksaan Agung mengembalikan peraturan tersebut ke UU No. 16 Tahun 2004 melarang buku-buku sejarah yang tidak mencantumkan kata PKI. Pada tahun 2010 ELSAM, organisasi advokasi perlindungan hak asasi manusia, memenangkan persidangan mengenai perdebatan pelarangan buku tersebut. Tetapi tampaknya kemenangan itu tidak benar-benar diterapkan oleh sekolah. Masih banyak sekolah menengah atas yang menggunakan buku sejarah yang menggunakan kata PKI di belakang G30S.

Angus Gratoon (2004) dalam penelitiannya mengenai pendidikan sejarah awal reformasi menemukan bahwa:

Sebelum gerakan Reformasi genap berumur 10 tahun, tepatnya pada awal tahun 2007, tindakan model Orde Baru dalam hal pelarangan buku itu telah menyeruak kembali ke tengah masyarakat. Pada tanggal 5 Maret tahun itu salah satu instansi pemerintah pusat mengeluarkan Surat Keputusan dengan nomor 19/A/JA/03/2007 berisi larangan terhadap 13 judul buku pelajaran sejarah, termasuk buku pelajaran untuk Kelas 1 dan Kelas 3 tingkat SLTP.

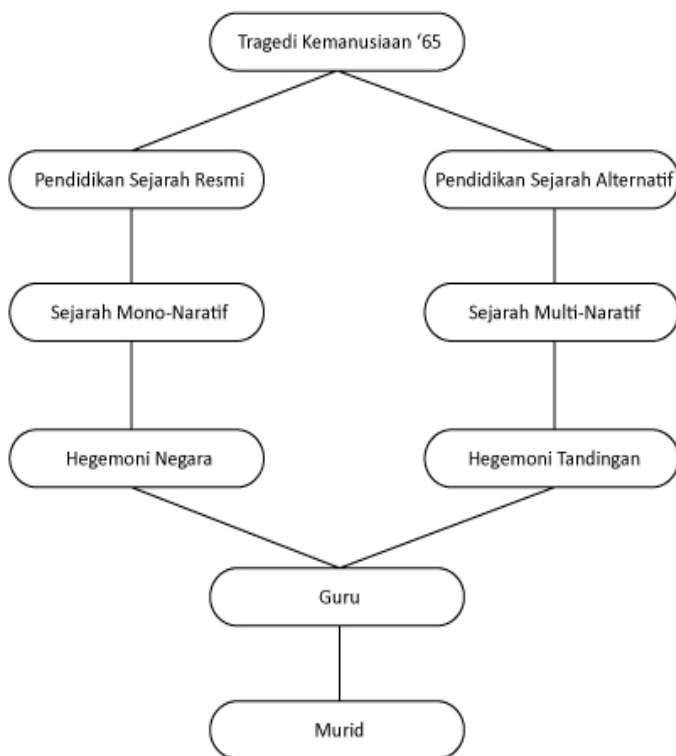
Penulis mencoba melakukan pendekatan partisipatif terhadap guru-guru sejarah di Yogyakarta dengan menawarkan medium yang berbeda dalam memberikan pendapat tentang banyaknya versi alternatif dari wacana Tragedi Kemanusiaan 1965, yaitu medium audio visual non-fiksi. Film dokumenter dengan tema Tragedi Kemanusiaan 1965 mulai banyak diproduksi seiring dengan runtuhnya Orde Baru. Narasi sejarah melalui film dokumenter bersifat multi dimensional dan multi naratif. Penulisan sejarah bukan hanya membutuhkan sumber-sumber tertulis, melainkan juga sumber-sumber lisan. Film dokumenter selalu berisi kesaksian langsung para korban dan sering disebut narasi sejarah lisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan film dokumenter berjudul *40 Years of Silence* yang disutradarai oleh Robert Lemelson dan bercerita mengenai Tragedi Kemanusiaan 1965 di Jawa dan Bali. Film ini berisi kesaksian para keluarga korban, baik yang menyaksikan langsung ataupun yang mengalami trauma dan dampak sosial dari peristiwa itu. Penulis berusaha menghadirkan film dokumenter kepada guru-guru sejarah untuk mengetahui respon mereka terhadap tarik-menarik kekuasaan dalam wacana Tragedi Kemanusiaan 1965.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha untuk menjawab bagaimana guru merespon sejarah wacana sejarah alternatif

65 yang disajikan dalam film dokumenter. Pertanyaan-pertanyaan yang dianalisa adalah:

1. Bagaimana perkembangan materi wacana Tragedi Kemanusiaan 1965 sebelum dan sesudah Reformasi 1998 di sekolah menengah atas di Yogyakarta dalam buku teks yang digunakan untuk bahan mengajar?
2. Bagaimana respon guru sejarah terhadap perkembangan materi wacana Tragedi Kemanusiaan 65?
3. Bagaimana respon para guru sejarah SMA di Yogyakarta terhadap reproduksi sejarah alternatif mengenai Tragedi Kemanusiaan 1965 dalam bentuk film dokumenter?
4. Bagaimana para guru sejarah SMA di Yogyakarta dalam menegosiasikan versi sejarah alternatif Tragedi Kemanusiaan 65 dengan institusi?

Dalam penelitian ini bisa dilihat bagaimana alur wacana sejarah berjalan melalui hegemoni negara secara mono-naratif, dan di satu sisi ada perlawanan dengan munculnya versi multi-naratif. Seperti yang terlihat di bawah ini:



Gambar 1. Bagan yang menjelaskan alur praktik kekuasaan dalam pendidikan untuk wacana Tragedi Kemanusiaan 1965.

Bagan di atas mengkaji praktek kekuasaan yang berhubungan dengan praktik-praktik budaya dan sejarah dalam institusi sekolah. Meminjam bahasa Paulo Freire, mengindikasikan keyakinan akan kekuatan potensi pendidikan untuk melakukan perubahan sosial lewat agen manusia, dan pendidikan menghubungkan kekuasaan dan politik, ketiganya terkait satu sama lain. Pada dasarnya, semua aktifitas pendidikan memang bersifat politis dan mempunyai konsekuensi dan kualitas politis.

Wacana Tragedi Kemanusiaan 1965 mempunyai dua versi, yaitu versi resmi dari pemerintahan (Orde Baru) dan versi alternatif dari berkembangnya hasil penelitian pasca Orde Baru. Versi resmi dari pemerintah mempunyai sifat yang mono-naratif karena apa yang mereka katakan mengenai peristiwa tersebut tidak bisa dibantah kebenarannya dan semua lapisan masyarakat didoktrin oleh wacana tersebut. Sedangkan versi alternatif sifatnya sangat multi-naratif yang merupakan penelitian bertahun-tahun beberapa institusi dan individu, juga tidak menutup kemungkinan untuk mendiskusikan lebih lanjut secara terbuka mengenai fakta dan kebenarannya. Hegemoni tandingan yang diciptakan oleh wacana alternatif ini merupakan reaksi atas ketidakpercayaan mereka terhadap kekuasaan negara dalam menciptakan narasi sejarah. Sebelum tumbanganya Orde Baru, pendidikan (baca:sekolah) hanya boleh mengajar sejarah topik Tragedi 65 dengan satu versi saja. Tetapi pasca Orde Baru, guru (seharusnya) mempunyai kebebasan untuk memberi banyak versi-versi narasi kepada muridnya.

Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sumber data primer adalah analisa buku teks untuk mengetahui perkembangan buku sejarah terkait wacana Tragedi Kemanusiaan 65 sebelum dan sesudah Reformasi 98. Kemudian data sekundernya adalah hasil wawancara dengan guru-guru sejarah untuk mengetahui respon mereka terhadap perubahan teks-teks sejarah sejak Orde Baru sampai Paska Orde Baru di buku pelajaran sejarah. Lebih jauh, sumber data sekundernya adalah untuk mengetahui respon guru-guru sejarah terhadap sumber data primer berikut respon mereka terhadap munculnya bentuk-bentuk alternatif pengajaran sejarah setelah Reformasi 98.

(Re)Produksi Penentuan Posisi Subjek sebagai Pahlawan atau Korban

Sebelum Orde Baru, pendidikan sejarah menjadi kurikulum berbasis ilmu pengetahuan namun tidak bertahan lama sampai pada tahun 1964, di mana kurikulum sejarah sangat bernuansa politis yaitu harus berlandaskan Pancasila dan Manipol (Manifestasi Politik UUD 1945 yang terdiri dari

Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia). Sebenarnya ide ini dapat diterima dengan akal sehat jika pada kenyataannya terdapat kecocokan antara teori dan praktik.

Sampai setelah Soekarno runtuh, masuklah kurikulum Orde Baru yang secara resmi diterapkan pada tahun 1968 yang juga bernuansa politis dengan diajarkannya PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa). Tujuan diadakan PSPB adalah agar murid meyakini: 1) Penjajahan Belanda menyebabkan kemiskinan dan penderitaan di kalangan rakyat Indonesia; 2) Kebenaran rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah; 3) Partai Komunis Indonesia secara sepihak menghancurkan NKRI; 4) Aksi melawan Partai Komunis Indonesia adalah didorong dengan prinsip membela kebenaran dan keadilan; 5) Orde Baru mengutamakan kepentingan negara dan Masyarakat.²⁴ Dari kelima poin tersebut sudah sangat jelas terbaca akan nuansa politis yang ditanamkan pada peserta didik yang ada di zaman bangkitnya Orde Baru.

Pada masa Orde Baru berjaya sejarah dibelokkan demi kepentingan politik dan sangat elitis terutama mengenai Tragedi Kemanusiaan 65. Jatuhnya Orde Baru, persis seperti ketika berdirinya rezim tiga puluh dua tahun sebelumnya, diselimuti oleh kerahasiaan dan penuh kekerasan. Pada tahun 1965 dilancarkan aksi militer terhadap pihak yang dituduh akan melakukan kudeta, yang berujung pada penghancuran terhadap mereka yang tidak mendukung Soeharto.

Pusat Sejarah ABRI sudah beroperasi ketika usaha kudeta terjadi. Di bawah arahan Nugroho Notosusanto, Pusat Sejarah ABRI langsung bekerja dengan tujuan untuk segera menerbitkan narasi kudeta versi Angkatan Darat. Hasilnya ialah 40 Hari Kegagalan "G-30-S" 1 Oktober-10 November, yang sebagian besar merupakan versi propaganda Angkatan Darat yang bertujuan membuktikan bahwa kudeta adalah hasil persengkokolan komunis. Buku itu adalah buku yang pertama kali ditulis mengenai kudeta Tragedi 1965 yang dikeluarkan Indonesia dan merupakan narasi berulang kali yang dikonsolidasi sepanjang periode rejim Orde Baru. Pusat Sejarah ABRI menegaskan bahwa buku tersebut berhasil meyakinkan masyarakat bahwa PKI adalah dalang dari kudeta.

Michael Van Langenberg berpendapat bahwa ditemukannya jenazah perwira angkatan darat merupakan bagian penting dari propaganda

24 *Ibid. hlm:48.*

awal mengenai kudeta.²⁵ Awalnya, Mayjen Soeharto juga menginginkan pengangkatan jenazah diliput oleh media, seperti yang diberitakan Pangkostrad di RRI dan TVRI, Senin 5 Oktober 1965 pukul 15.00²⁶:

“Jelas betapa kejam dan biadabnya aniaya yang dilakukan petualang-petualang G30S. Ketujuh jenazah Pahlawan Revolusi, 6 Jenderal dan seorang perwira pertama, ditemukan dalam keadaan tubuh yang jelas penuh luka karena siksaan. Bekas luka di sekujur tubuh pahlawan kita.”

Hasil otopsi yang dilakukan tim forensik bentukan Soeharto yang terdiri dari dua orang dokter tentara, masing-masing Brigjen dr. Roebiono Kertopati dan Kolonel dr. Frans Patiasina, dan tiga ahli forensik sipil dan Fakultas Kedokteran UI, Prof. dr. Sutomo Tjokronegoro, dr Liauw Yan Siang, dan dr. Liem Joey Thay dengan Surat Perintah nomor PRIN-03/10-1965 ternyata berbeda jauh dari yang diberitakan di media. Dokter Lim Joey Thay, tidak menemukan satupun tanda-tanda penyiksaan seperti yang diberitakan. Surat forensik ini mulai pelan-pelan muncul ke publik pasca Reformasi 98 dan jatuhnya Soeharto, apalagi setelah film Pengkhianatan G30S/PKI dihentikan penayangannya. Hal ini membuat banyak orang kembali bertanya mengenai kesahihan kronologis peristiwa Tragedi Kemanusiaan 1965.

Dalam buku pelajaran sejarah banyak menyebutkan bahwa jenderal-jenderal itu dinarasikan sebagai simbol pembela Pancasila. Dari situ, Orde Baru berhasil membuat konstruksi dan rekonstruksi sejarah yang hegemonik dan manipulatif untuk membuat fakta-fakta sejarah yang menjadi momok masyarakat²⁷.

Jika benar tidak ada penyiksaan, dengan demikian muncul persepsi bahwa ada peran besar media massa terhadap keberhasilan Soeharto menumpas PKI dan lawan-lawan politiknya. Peran media massa disini termasuk media cetak, radio, audio-visual, dan dampak nyatanya adalah pembentukan opini publik dari propaganda media massa itu.

25 Langeberg, Michael Van. *Gestapu and State Power in Indonesia*, dalam Robert Cribb, *The Indonesian Killings of 1965-66: Studies from Java and Bali*. Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990), hal. 48.

26 A. Pambudi. 2011. *Antara Fakta dan Rekayasa*. Jakarta: PT. Buku Seru, hal. 19.

27 Dedy Kristanto, dalam tesis berjudul *(Politik) Ingatan Pekerja Kemanusiaan: Trauma dan Identitas Pekerja Kemanusiaan Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia dalam Program Rekonsiliasi-Repatriasi Pasca Jajak Pendapat 1999 di Timor Leste*, dalam pemenuhan untuk Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Pendidikan menjadi alat politik Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. Menurut Michael Sturmer, masa depan dikuasai oleh mereka yang menguasai isi ingatan, yang merumuskan konsep dan menafsirkan masa lalu.²⁸ Dalam hal ini pemegang kekuasaan tentu akan melakukan “penguasaan ingatan kolektif.” Dan penguasaan sejarah dipakai untuk membenaran sistem yang dipakai untuk masa depan.

Upaya mencekoki masyarakat termasuk murid sekolah dengan versi resmi Orde Baru telah berjalan puluhan tahun. Jelas butuh waktu untuk “membenahi” sesuatu yang telah diporak-porandakan sekian lama. Historiografi sejarah Indonesia pada masa Orde Baru memiliki kekuatan narasi formal yaitu historiografi resmi yang ditulis oleh negara yang biasanya ditampilkan dalam buku Sejarah Nasional. Namun disisi lain, seiring tumbanganya Orde Baru, pendidikan sejarah juga harus terbuka terhadap wacana alternatif yaitu narasi-narasi yang selama ini terbungkam karena adanya dominasi ideologis.

Pendidikan sejarah yang bersifat statis ini menimbulkan kebingungan bagi guru sejarah dan murid. Pada saat Orde Baru, mereka terbiasa membaca sejarah yang cenderung mendiskreditkan satu pihak tertentu. Selepas Reformasi 98, “pahlawan” yang dulu dipuja-puja seketika harus berubah karena perkembangan historiografi. Banyak buku yang akhirnya cenderung menulis peristiwa Tragedi Kemanusiaan 1965 dengan menyertakan lebih dari satu pendapat. Guru sejarah harus berupaya menyesuaikan materi dengan mengikuti perubahan-perubahan wacana tersebut dan mengajak murid-murid untuk berpikir kritis dengan melihat perubahan yang terus terjadi. Kontroversi wacana Tragedi Kemanusiaan 1965 tidak sebatas pada pencatuman tiga huruf di belakangnya saja, namun juga karena ada berbagai versi terhadap tafsiran peristiwa tersebut.

Disini penulis mengambil data dari buku teks pelajaran sejarah sebelum Reformasi 98 sampai yang terbitan terbaru beserta analisa terhadap polemik atas respon beberapa lembaga mengenai pencantuman beberapa topik tertentu di buku teks sejarah. Dewasa ini, kedudukan buku teks menjadi semakin sentral dalam proses mengajar di ruang kelas karena guru merasa sulit dan berat untuk mengembangkan sendiri materi pelajaran yang diajarkan karena faktor internal dan tuntutan institusi. Terlebih lagi, pada tahun 2005 Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan peraturan

28 Dikutip oleh Taufik Abdullah, 1996. *Masalah Kontemporer Ilmu Sejarah dan Historiografi*, Makalah Kongres Nasional Sejarah, hal. 2.

No.11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran. Pada Pasal 3 ayat 1 tertulis bahwa buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh menteri berdasarkan rekomendasi penilaian kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tahun 2005.

Penelitian menempatkan data tekstual tentang Tragedi Kemanusiaan 1965 dari jaman Orde Baru sampai paska Orde Baru. Data tekstual yang digunakan adalah buku yang digunakan dalam pelajaran sejarah di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Yogyakarta. Di SMA, materi Tragedi Kemanusiaan 1965 diajarkan pada kelas XI program IPA semester II dan kelas XII program IPS semester I. Selama Orde Baru telah terjadi tiga kali pergantian kurikulum, yaitu tahun 1975, tahun 1984 dan tahun 1994. Karena kesulitan data untuk mendapat sumber lebih dari buku teks, maka penulis hanya menggunakan satu buku yang diterbitkan sebelum tahun 1998, yang akan kemudian ditunjang oleh analisa dari data wawancara dengan guru yang bersangkutan.



Gambar 2. Sampul Luar buku Pelajaran Sejarah berjudul Sejarah Nasional Indonesia & Dunia Jilid III, Disusun oleh Tim MGMP Sejarah SMU Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1996.

Tragedi Kemanusiaan 1965 diulas di catur wulan pertama atau terdiri dari dua puluh empat jam pelajaran. Pada pengantar disebutkan program pengajarannya antara lain menelaah terjadinya pengkhianatan Gerakan 30 September/PKI dan penumpasannya. Indikator pada bahasan tentang kontroversi wacana ini adalah menganalisa proses peralihan kekuasaan politik setelah Gerakan 30 September 1965. Pada masa Orde Baru, indikator pencapaian pada materi Tragedi Kemanusiaan 1965 adalah:²⁹ (1) Mengidentifikasi strategi politik PKI masa demokrasi liberal dan terpimpin, (2) Mengidentifikasi aksi-aksi sepihak PKI sebelum G30S/PKI 1965, (3) Menunjukkan kaitan antara gerakan 30 September dengan dewan revolusi, (4) Menjelaskan bahwa Gerakan 30 September adalah aksi perebutan kekuasaan yang sah, (5) Mengidentifikasi nama-nama dalang di balik G30S/PKI, (6) Menganalisa kebenaran isu adanya dokumen Gilchrist³⁰, (7) Menerangkan prosesi pengangkutan jenazah korban kebiadaban PKI di Lubang Buaya, (8) Menyebutkan upaya-upaya penumpasan G30S/PKI 1965, (9) Menjelaskan akibat sosial politik G30S/PKI 1965, (10) Mengidentifikasi adanya bahaya laten komunis.

Di dalam buku sejarah terbitan Orde Baru ini sangat bernuansa politik. Pengaruh tersebut terlihat jelas dalam isi dan materi yang mengagungkan rejim tersebut sebagai pengamal ideologi Pancasila. Namun terlihat jelas bahwa cara Orde Baru kental dengan sikap diskriminatif terhadap

29 Indikator ini ditulis di blog www.sejarahkritis.wordpress.com yang berjudul *Tipe Pembelajaran Sejarah Kontroversial*, oleh tsabitazinarahmad. Tanggal unggah 2 April 2012. Penulis blog melakukan penelitian mengenai kontrovesial wacana G30S dan Supersemar di sekolah. Sedangkan 10 indikator yang tertulis berdasar oleh penelitiannya di kota Semarang yang didapat dari Lembar Ujian Kompetensi Siswa, disusun oleh MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Sejarah.

30 Dokumen Gilchrist (bahasa Inggris: Gilchrist Document) adalah sebuah dokumen yang dahulu banyak dikutip surat khabar pada era tahun 1965 yang sering digunakan untuk mendukung argumen untuk keterlibatan blok Barat dalam penggulingan Soekarno di Indonesia. Namun dokumen tersebut kemungkinan besar palsu atau sebenarnya tidak ada. Dokumen ini konon sebenarnya berasal dari sebuah telegram dari Duta Besar Inggris di Jakarta yang bernama Andrew Gilchrist yang ditujukan kepada Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris. Pada Mei 1965 sejumlah anggota Pemuda Rakyat yang menyerbu vila milik Bill Palmer, distributor film Amerika di Puncak, Bogor, Jawa Barat yang diduga jadi mata-mata CIA. Saat itu para pemuda juga menemukan dokumen yang memuat telegram rahasia Sir Andrew Gilchrist kepada atasannya di Kementerian Luar Negeri Inggris tentang kemungkinan kerjasama antara Inggris dengan Angkatan Darat Indonesia (*Our local Army friends*) serta rencana gabungan Inggris-AS untuk mengintervensi Indonesia. Sumber: <http://historia.co.id/?d=703> . 17 Maret 2011.

rejim sebelumnya yang dianggap banyak melakukan penyimpangan dan historiografi resmi sejarah nasional harus sejjin dari militer, apabila tidak ada sejjin dari yang bersangkutan maka akan dianggap sebagai historiografi yang tidak resmi. Seperti yang tercantum dalam buku pelajaran sejarah terbitan 1996 ini dari judul sub-bab untuk topik Tragedi Kemanusiaan 1965 diberi judul Pengkhianatan G30S/PKI, masuk dalam bab pertama untuk pembahasan.

Sub bab ini terdiri dari tiga bagian. Pertama, pengkhianatan G30S/PKI yang membahas kronologi antara lain kronologis peristiwa tanggal 1 Oktober 1965 yaitu dari awal RRI mengenai gerakan militer yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo yang ditujukan kepada para Jenderal. Kedua, pembentukan Dewan Revolusi Indonesia. Ketiga, menyiarkan pidato Mayor Jendral Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat, berisi tentang pemberitahuan bahwa Gerakan 30 September adalah Gerakan Kontra Revolusioner yang telah menculik perwira tinggi Angkatan Darat dan telah mengambil alih kekuasaan negara (*coup*), seperti yang tertulis di bawah ini:

“G. Pengkhianatan G 30 S / PKI dan Penumpasannya

...Kesatuan-katuan Aksi, ABRI, semua organisasi politik dan organisasi masa yang setia pada Pancasila dan UUD 1945 berjuang membela kepentingan rakyat. Mereka berusaha menyampaikan Tiga Tuntutan Rakyat (Tri Tura) yaitu:

- a. Bubarkan PKI
- b. Bersihkan Kabinet dari unsur PKI
- c. Turunkan harga

Perjuangan mereka lewat konstitusi gagal sehingga mereka menempuh cara lain, yaitu ke jalan. Tindakan ini beberapa kali dilakukan sehingga mengganggu ketertiban umum. Namun akhirnya yang salah tetap salah, dan yang benar akan tampak benar. Pada tanggal 12 Maret 1966 PKI sebagai dalang pemberontakan G 30 S/ PKI berhasil dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Pembubaran PKI tersebut dilakukan oleh Jendral Suharto selaku pemegang Supersemar 1966. Untuk memperkuat tindakan pengembalian Supersemar maka MPRS dalam Sidang Umum IV 1966 menetapkan pembubaran PKI dengan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

PKI telah bubar namun idiologi Komunis masih ada. Oleh sebab itu kita harus waspada terhadap bahaya laten Komunis. Satu-satunya penangkal

ideologi komunis adalah Pancasila. Karena itu setiap warga negara Indonesia harus mau dan mampu menghayati dan mengamalkan Pancasila sampai titik darah penghabisan”³¹

Kronologis peristiwa di atas adalah satu-satunya wacana yang berlaku pada saat itu. Kurang lebih semua buku pelajaran sejarah di sekolah Yogyakarta menggunakan versi yang sama dan telah ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Dengan mengikuti kurikulum 1994, bukan berarti permasalahan politisasi kurikulum selesai, melainkan justru permasalahan menjadi semakin kompleks.³² Dari buku sejarah terbitan tahun 1996 di atas, mengacu pada kurikulum yang sarat dengan berbagai pengetahuan yang makro dan sepihak, sehingga untuk situasi mikro bagi Indonesia dianggap kurang relevan. Menurut Katherine McGregor, rejim Orde Baru juga digambarkan sebagai rejim yang otoriter karena pengendaliannya yang ketat terhadap pendidikan dan media.³³

Sepanjang pemerintahan Orde Baru, militer memang memegang peranan penting dalam birokrasi dan alat politik pemerintahan karena menjadi semacam pemerintah bayangan dalam setiap regional. Seperti yang diungkapkan Drs. Ponirin di Jurnal Jasmerah³⁴:

“Dari buku-buku sejarah Orde Baru tampak jelas bagaimana narasi sejarah tunggal atau seragam telah dibangun canon yang berguna untuk kepentingan Orde Baru dan militer, yakni 1) Sebagai legitimasi naiknya Orde Baru ke panggung politik guna memimpin Indonesia dengan cara memproduksi versi peristiwa Gerakan 30 September yang tabu untuk diperdebatkan selama Suharto memimpin; 2) Sebagai pengokohan kekuatan militer di Indonesia dengan menempatkan militer sebagai penyelamat bangsa dan penjaga stabilitas politik dan ekonomi republik ini. Orde Baru dan militer dalam narasi sejarah Indonesia versi Orde Baru diinterpretasikan dalam seragam yang sama. Dengan kata lain, sejarah yang dibangun adalah untuk melegitimasi rezim, baik itu Orde Baru maupun kolektivitas militer. Keduanya dapat diberi garis pembeda, tetapi tidak dapat dipisahkan.

31 Siti Waridah Q dan J. Sukardi. 1996. *Penunjang: Sejarah Nasional Indonesia & Dunia*. Yogyakarta, hal. 58.

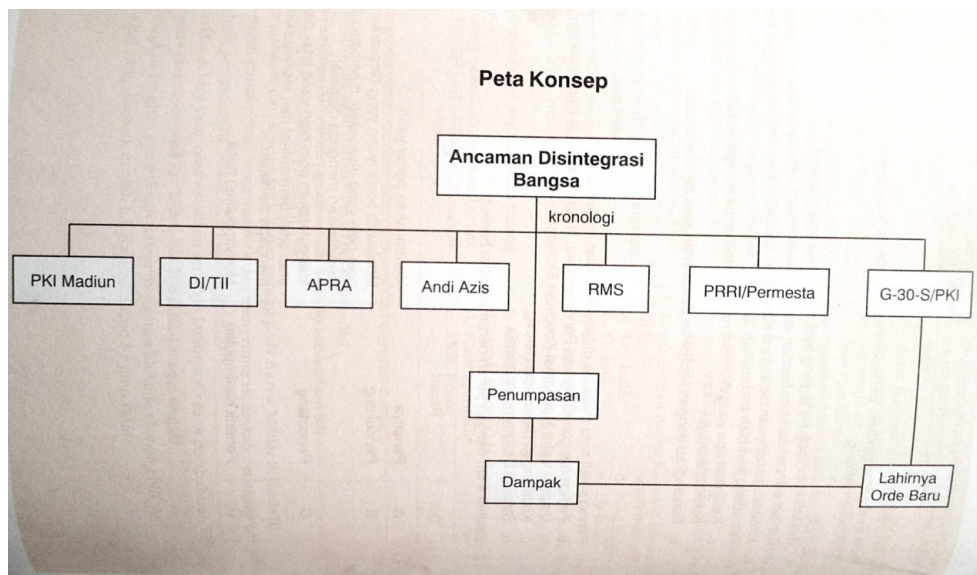
32 Aman. 2012. *Model Evaluasi Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, hal. 49.

33 Katherine McGregor. 2008. *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia*. Syarikat. Yogyakarta, hal. 66.

34 Ponirin. 2012. *Nasionalisme dan Patriotisme*. Medan: Jurnal Jasmerah UNIMED, yang dikutip oleh Andre Bagus Irshanto, untuk tugas mata kuliah *Kajian Buku Teks berjudul Mendekonstruksi Historiografi Buku Teks SMP dan SMA Pada Masa Orde Baru*.

Bilamana berbicara tentang Orde Baru, maka ada militer di dalamnya, dan militer merupakan bagian dari kekuatan Orde Baru.”

Gaya penulisan buku teks sejarah pada masa Orde Baru juga terlihat sangat subjektif, karena pada masa itu yang dianggap sejarah resmi nasional adalah wacana sejarah yang disetujui oleh pemerintah dan anggota militer. Hal tersebut diperkuat peta konsep pada bab tiga di buku pembelajaran topik tersebut, di buku terbitan Yudhistira³⁵, karangan Prof. Dr. M. Habib Mustopo dkk, berjudul Pemberontakan G-30-S/PKI, isinya:



Gambar 3. Peta Konsep untuk pembelajaran Bab 3, Perjuangan Terhadap Ancaman Disintegrasi Bangsa di buku teks sejarah dari Penerbit Yudhistira. 2010. Halaman 78.

Peta konsep diatas memadukan ilmu sejarah yang diakronis, yaitu mengkaji secara vertikal suatu peristiwa atau fenomena yang sama dengan memperhatikan kronologis dan bersifat sinkronis yaitu mengkaji suatu peristiwa atau fenomena secara horisontal pada waktu dan tempat yang berbeda dalam setiap penjelasan periodenya. Namun jika melihat dari bagan sebab akibat dan peristiwanya, peta konsep di atas tidak mengikutsertakan akibat dan dampak lahirnya Orde Baru dan pelarangan terhadap Partai Komunis Indonesia.

35 M. Habib Mustopo dkk. 2002. *Sejarah SMA Kelas XII Program IPS Kelas 3*. Yudhistira, hal. 100.

Masuk di bagian pembahasan tentang PKI, buku terbitan Yudhistira ini mengawali dengan Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dan dijabarkan betapa dekat hubungan PKI dengan Sukarno pada saat itu. Cara penyampaian buku ini ternyata juga masih dipenuhi dengan sikap subjektif dengan menjelaskan bahwa PKI identik dengan aksi-aksi brutal dan vigilantis, contohnya seperti yang dijabarkan pada halaman 100-107:

“...PKI mendasarkan politiknya atas analisis Marxis mengenai keadaan yang konkrit dan perimbangan kekuatan.” Berdasarkan pernyataan ini PKI mulai mengambil langkah-langkah persiapan untuk mengimbangi cara parlementer dengan cara lain, yaitu cara-cara kekerasan.”

Dari situ kemudian dijelaskan bentuk-bentuk kekerasan apa saja yang telah dilakukan PKI sebelum peristiwa Tragedi Kemanusiaan 1965, seperti sabotase, aksi masa dan aksi sepihak, teror, perusakan, agitasi dan propaganda. Buku ini adalah buku pengganti setelah cetakan sebelumnya telah ditarik oleh Kejaksaan Agung terkait dengan pelarangan peredaran buku-buku sejarah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 19/A/JA/2007 tanggal 5 Maret 2007 yang isinya melarang peredaran dan penggunaan sejumlah buku pelajaran sejarah. Pelarangan tersebut dilakukan karena buku-buku itu tidak mencantumkan sejumlah fakta pemberontakan PKI di Madiun dan tidak menyertakan kata PKI di belakang G-30-S. Di beberapa daerah, bahkan terjadi aksi pembakaran buku-buku teks sejarah. Buku-buku yang dimusnahkan antara lain *Kronik Sejarah Kelas 1 SMP* dengan penerbit Yudhistira, *Manusia Dalam Perkembangan Zaman* penerbit Ganeca Exact, *Sejarah 2 untuk SMP* penerbit Erlangga, *Sejarah 3 untuk SMP* penerbit Erlangga, *Sejarah Nasional 1 SMA* penerbit Bumi Aksara, *Sejarah Nasional dan Umum 1 SMA* penerbit Balai Pustaka serta beberapa buku yang mengacu pada kurikulum 2004. Mereka menuntut untuk semua buku teks resmi terbitan paska Orde Baru menggunakan kata PKI, hal ini telah menimbulkan perdebatan di antara banyak pihak. Pada saat itu Menteri Pendidikan Nasional beserta dengan beberapa saksi dan ahli sejarah dipanggil untuk menyelesaikan masalah ini seperti Taufik Ismail, sastrawan dan K.H. Yusuf Hasyim, selaku Pelaku dan Saksi Sejarah yang menginginkan supaya versi yang ditulis di buku teks sejarah adalah G30S/PKI bukan hanya G30S saja karena mereka berpendapat bahwa PKI adalah pihak yang bersalah dan pelaku dari penculikan para jenderal Angkatan Darat di Lubang Buaya, disertai dengan kekacauan stabilitas nasional yang terjadi setelah peristiwa tersebut. Sedangkan Asvi Warman Adam, sejarawan dan peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menginginkan ingin meluruskan sejarah

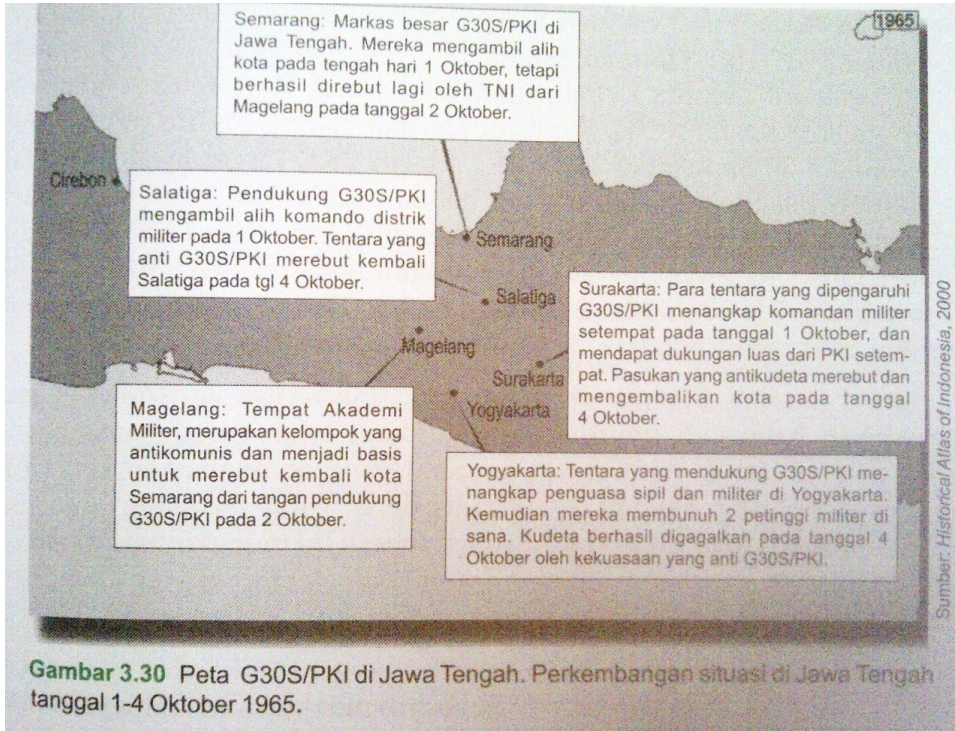
yang ditulis oleh Orde Baru dengan kurikulum 2004 yang mengedepankan alternatif analisa dari peristiwa G 30 S dengan melihat peristiwa tersebut secara multi-dimensional³⁶.

Sedangkan di buku terbitan Erlangga diperkuat dengan beberapa gambar seperti pada halaman 78 mengenai pembunuhan para jenderal Angkatan Darat tersebut dan perkembangan situasi pemberontakan:



Gambar 4. Enam jenderal Angkatan Darat dan satu perwira tinggi yang di buku teks Sejarah terbitan Erlangga, diinformasikan bahwa mereka adalah korban keganasan Partai Komunis Indonesia karena dibunuh dan dimasukkan ke sumur Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965.

36 Achdian, Andi. *Menuju Masyarakat Sadar Sejarah. Buku Teks Sejarah: Kontroversi Penarikannya* oleh Kejaksaan Agung yang ditulis di blog pribadi onghokham-institute. blogspot.com/2007/10/buku-teks-sejarah-kontroversi.html. Akses terakhir: Oktober 2007. (lihat lampiran)



Gambar 3.30 Peta G30S/PKI di Jawa Tengah. Perkembangan situasi di Jawa Tengah tanggal 1-4 Oktober 1965.

Gambar 5. Peta peristiwa Gerakan 30 September di Jawa Tengah pada tanggal 1 sampai 4 Oktober 1965 yang dimuat di buku teks Sejarah kelas XII. Penerbit oleh Erlangga, 2006. Sedikit berbeda dengan penerbit Yudhistira, penerbit Erlangga memberi wacana alternatif di akhir bab pembahasan tentang Tragedi Kemanusiaan 1965. Menurutnya, peristiwa Gerakan 30 September mempunyai beberapa versi tentang siapa dalangnya. Meskipun dari awal buku ini mencantumkan kata PKI di belakang G30S, tetapi penulisan yang multi-naratif di penutupan bab setidaknya memberi gambaran kepada para guru sejarah dan murid-muridnya tentang versi alternatif di luar versi resmi sejarah nasional.

Menyikapi beberapa polemik perubahan dalam kurikulum pelajaran sejarah, guru sejarah tidak perlu terpengaruh oleh perubahan-perubahan yang bersifat politik dan paradigmatis, melainkan justru semakin bebas dan merdeka untuk menjalankan fungsinya sebagai pendidik. Namun tidak bisa berhenti sampai di situ saja, guru menempati posisi yang serba salah karena kedudukannya lemah di dalam institusi. Lembaga sekolah menuntut guru sampai pada tahapan-tahapan dan target tertentu dalam setiap pembelajaran, jadi terkadang guru akan fokus pada target-target tersebut dibanding memperhatikan kualitas pembelajaran para murid-murid itu sendiri.

Dari keempat analisa buku-buku teks sejarah di atas dapat disimpulkan bahwa pelajaran sejarah sebagian besar masih berbicara mengenai kekuasaan dan menggambarkan pemerintah dengan birokrasinya. Problematika yang timbul dalam pengajaran sejarah yang menggunakan versi alternatif yang tidak mengikuti birokrasi institusi memang sangat beresiko dan dianggap tidak sesuai dengan fakta.

Respon Guru terhadap Inkonsistensi Kurikulum

Dari hasil wawancara di salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri di Yogyakarta, saat ditanya buku mana yang digunakan untuk mengajar, dia berpendapat bahwa buku-buku sejarah di sekolahnya masih menggunakan versi Orde Baru:

“Saya dipanggil ke Bogor dengan guru-guru dari luar Jogja untuk memilih buku teks yang ada di situ, ternyata saat kami harus memilih buku-buku itu, sesungguhnya fakta-fakta yang tersajikan logis, tapi saya *ndak* tau pasti karena BSNP itu sendiri juga menghadirkan dosen-dosen perguruan tinggi, yang saya tahu dulu pak Joko Suryo dari Sejarah UGM, nampaknya dari pemerintah belum mengizinkan kalau ada buku sejarah yang mencamtumkan G30S tanpa PKI.”

Hal yang diungkapkan diatas tidak berbeda jauh dengan beberapa sekolah lain saat ditanya mengenai bahan acuan yang digunakan untuk mengajar, seperti jawaban dari salah satu guru Sekolah Menengah Atas nasional di bawah ini:

“Ya memang kalau buku, bagaimanapun juga kita harus mengikuti apa yang ditetapkan dan disuplai oleh penerbit. Karena mereka langsung datang ke sekolah toh...Tapi beberapa waktu lalu kan sempat ada perdebatan tentang pencantuman kata PKI ya, bagi saya itu tidak masalah selama guru sejarah bisa menggunakan metode yang lain”

Dari contoh jawaban di atas, bisa disimpulkan bahwa guru mempunyai sifat bebas dalam mengajar di dalam kelas, namun dia tetap harus ikut dalam birokrasi sekolah untuk tetap menggunakan buku teks resmi sejarah. Pada pelaksanaannya, upaya untuk mengajarkan sejarah yang alternatif masih merupakan hal yang baru dan jarang dilakukan. Kekritisan memang akan menciptakan disiplin intelektual yang dibutuhkan, mampu mengajukan pertanyaan atas bacaan, penulisan, buku dan teks. Namun saat ditanya mengenai bagaimana mereka menuturkan versi-versi alternatif kepada para murid, jawabnya:

“Ya saya sih mendukung adanya penulisan-penulisan alternatif ya *mbak*, tapi memang kurikulum yang saya coba lakukan adalah, kurikulum pemerintah versi materi-materi yang di tetapkan pemerintah dalam kurikulum ya saya berikan. Cuma menurut saya itu terlalu kurus, terlalu apa ya? Ibarat kita ini peternak kambing, peternak lembu setiap hari kita ini hanya kasih mereka itu rumput kering dan jerami. Jadi bisa anda bayangkan betapa kurang berkaidahnya asupan seperti ini, kalau kambing dan lembu yang kita pelihara hanya kita beri rumput kering dan jerami, bisa kita bayangkan kualitas produk kita. *Nah*, ini *kan* pendidikan ini *kan* bukan hanya pengajaran, kalau para siswa itu hanya diberi materi yang.. apa namanya... materi materi itu ada bahaya maksud saya hanya sekedar pelatihan menjadi bodoh, stupidifikasi. Kalau tidak hati-hati seperti itu.”

Dalam wawancara di atas, guru sejarah terlihat mengetahui banyak versi alternatif dari peristiwa Tragedi Kemanusiaan 1965, namun saat dihadapkan dengan transisi pengetahuan kepada para murid, dia tidak berani mengambil resiko untuk memberikan versi tersebut dalam proses pengajaran. Pendidikan disini sangat jelas dilihat sebagai tindakan politis. Oleh sebab itu sangat sulit melakukan bentuk pedagogi yang netral, guru sejarah seolah-olah dihadapkan pilihan untuk mengambil posisi kanan atau kiri, hitam atau putih. Yang terjadi dalam pengambilan data tulisan ini adalah, hal ini terjadi hanya di Sekolah Menengah Umum Negeri. Agaknya mereka memiliki bentuk dan isi yang berhubungan erat dengan kekuasaan di masyarakat, yang membentuk sistem di dalam institusi dan menegaskan dominasi kekuasaan tersebut.

Kekuasaan Orde Baru telah membentuk pandangan ini, mereka terbiasa dengan sikap menerima apa yang harus diajarkan oleh pemerintah, dan tidak boleh memberi alternatif lain diluar pengajaran yang ditetapkan tersebut. Paket-paket pengajaran menjadi alat-alat propaganda dari birokrasi besar dengan misi dan kepentingannya.³⁷

“Jangankan siswa, *lha wong* gurunya saja masih memperdebatkan berbagai versi. Malah ketika forum MGMP (*Musyawahar Guru Mata Pelajaran*) Sejarah mempertanyakan, apakah ketika banyak terbit buku putih ini dan itu malah berdampak pada kebingungan siswa ? Saya tegas mengatakan, sejarah *kan* sesuatu yang tidak final, ada hukumnya

37 Mangunwijaya. 2008. *Pendidikan yang Memerdekakan Rakyat*. Yogyakarta: CV. Diandra Primamitra Media, hal. 91.

ketika ditemukan fakta dan bukti baru, yang lama harus gugur *ya kan..* Guru-guru harus memahami hal seperti itu. Karena para guru telah terjebak *status-quo* tadi, pokoknya enggan berpikir lain. Saya memaklumi itu, *toh* mereka adalah pekerja-pekerja teknis saja. Guru itu *kan* pekerja teknis *ya*, jarang ada yang berupaya untuk mengadakan pembaharuan pada bidangnya. Jadi ketika harus didistorsi seperti sekarang pun harus terima-terima sajalah. Bayangkan saja, kita selama 32 tahun diindoktrinasi seperti itu, sehingga sudah menjadi dogma *ya..* Sejarah lalu didogmakan seperti itu. Sebagaimanapun itu, harus ada perubahan narasi. Karena kehidupan berbangsa dan bernegara ini kedepan ini akan sangat berbahaya, ketika dibalik itu tidak ada kejujuran. Pembantaian yang memakan nyawa sekian ratus ribu dianggap biasa saja, ini sesuatu yang berbahaya menurut saya. *Ndak* usah diutik-utik.. *ndak* usah dimunculkan lagi.. dengan pendekatan HAM misalnya. Ini kan bahayanya ke depan, sesuatu yang kita lakukan kekerasan apapun akan dianggap hal yang biasa, ketika peristiwa yang sebesar itu terjadi lagi, *toh* juga nantinya dianggap biasa saja.”

Menanggapi guru yang memiliki resistensi cukup besar terhadap institusi tempatnya mengajar seperti di atas, tentunya akan menarik saat bertanya bagaimana posisinya dalam lembaga formal. Katanya, ternyata tidak semua guru di Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta berani mengambil resiko untuk memberi wacana alternatif tentang Tragedi Kemanusiaan 1965. Memang semua dari mereka mengetahui adanya versi-versi lain di luar buku-buku teks resmi dari Menteri Pendidikan Nasional. Namun hanya beberapa dari mereka yang mau mengimplementasikannya dalam proses belajar di kelas.

Saat mengadakan workshop tentang proses pembelajaran alternatif yang diadakan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, salah satu guru dari Sekolah Menengah Atas beragama di Yogyakarta mengatakan bahwa dia tidak mau mengambil resiko karena mengambil jalan di luar yang ditentukan. Hal ini bisa dilihat bahwa pelajaran sejarah masih sangat dikuasai oleh lembaga resmi pemerintahan sehingga masih ada tingkat kekuasaan dan ketakutan bagi guru sejarah. Namun, tambah guru di lain sekolah, pembatasan pelarangan buku tidak bisa dilakukan lagi, karena kontroversi selalu bisa diakses oleh murid melalui media sosial dan teknologi. Penulis berharap penelitian ini mempunyai kontribusi yang besar bagi penelitian sejarah di masa mendatang, terutama pada pendidikan sejarah. Penggunaan media alternatif dalam proses belajar-mengajar adalah tujuan utama penelitian. Penulis berharap adanya bentuk penyajian buku

teks sejarah yang kritis dan adanya perubahan kurikulum sejarah dalam penelitian selanjutnya. Penyajian sejarah alternatif dalam pengajaran sejarah oleh guru hendaknya melibatkan para peserta didik secara aktif, sehingga proses ajar di ruang kelas bersifat dialogis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Asvi Warman. (1997). *Pengendalian Sejarah Sejak Orde Baru dalam Buku Panggung Sejarah*.
- Aman. (2011). *Model Evaluasi Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Apple, Michel W. (1979). *Ideology and Curriculum*, Chapter 2: Ideology and Cultural and Economic Reproduction. New York: Routledge & Kegan Paul.
- Foucault, Michel. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*. London: Penguin Books.
- Freire, Paulo. (2011). *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- <http://historia.co.id/?d=703>. 17 Maret 2011.
- Irawanto, Budi. (www.budiirawanto.multiply.com), 5 Oktober 2008.
- Kristanto, Dedy. (Politik) *Ingatan Pekerja Kemanusiaan: Trauma dan Identitas Pekerja Kemanusiaan Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia dalam Program Rekonsiliasi-Repatriasi Pasca Jajak Pendapat 1999 di Timor Leste*. Tesis. (2012). Magister Ilmu Religi dan Budaya. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Langeberg. Michael Van. *Gestapu and State Power in Indonesia*.
- McGregor, Katherine. (2008). *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Syarikat.
- Mulder, Niels. (2000). *Individu, Masyarakat, dan Sejarah: Kajian Kritis Buku-Buku Sekolah di Indonesia* (Bagian 2), Yogyakarta: Kanisius.
- Pambudi, A. (2011). *Antara Fakta dan Rekayasa*. Jakarta: PT. Buku Seru.
- Shor, Ira & Paulo Freire. (2001). *Menjadi Guru Merdeka*. Yogyakarta: LKIS.
- Waridah Q, Siti dan J. Sukardi. (1996). *Penunjang: Sejarah Nasional Indonesia & Dunia*.